

Membangun Keterampilan Berpikir: Potensi Guru Sejarah dalam Mempromosikan Literasi Kritis

Soma Surya Persada, Suryo Ediyono

Universitas Sebelas Maret
somasurya12@student.uns.ac.id

Article History
received 1/12/2021

revised 8/12/2021

accepted 15/12/2021

Abstract

The learning strategy applied by the history teacher basically affects the process and learning outcomes of students. Moreover, in the 21st century, various challenges arise so that the concept of 21st century education is needed to face these challenges. One of the efforts that history teachers can do in facing the challenges of 21st century education is to promote critical literacy. This article is a theoretical study written using the literature study method. The purpose of writing this article is to try to embody the two discussions. First, provision of critical literacy for prospective history teachers. Second, the strategy of history teachers in promoting critical literacy to students. Based on the results of the study of literature, it can be concluded that history teachers basically have the potential to promote critical literacy to students through the concept of historical thinking skills and controversial historical discourses. Considering that, in the education process at the tertiary level, prospective history teachers are very familiar with critical literacy so that they have the opportunity to transmit the implementation of critical literacy to students in secondary schools.

Keywords: *Critical Literacy, thinking skills, history teacher, history education*

Abstrak

Strategi pembelajaran yang diterapkan guru sejarah pada dasarnya berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Apalagi pada abad 21 muncul berbagai tantangan sehingga diperlukan konsep pendidikan abad 21 untuk menghadapi tantangan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru sejarah dalam menghadapi tantangan pendidikan abad 21 adalah mempromosikan literasi kritis. Artikel ini bersifat kajian teoretis yang ditulis menggunakan metode studi literatur. Adapun tujuan penulisan artikel ini yaitu berupaya mengejawantahkan dua bahasan. Pertama, bekal literasi kritis calon guru sejarah. Kedua, strategi guru sejarah dalam mempromosikan literasi kritis kepada peserta didik. Berdasarkan hasil pengkajian studi literatur, dapat disimpulkan bahwa guru sejarah pada dasarnya sangat berpotensi untuk mempromosikan literasi kritis kepada peserta didik melalui konsep ketampilan berpikir historis dan wacana sejarah kontroversial. Mengingat, dalam proses pendidikan di jenjang perguruan tinggi, calon guru sejarah sangat akrab dengan literasi kritis sehingga sangat berpeluang menularkan implementasi literasi kritis kepada peserta didik di sekolah jenjang menengah.

Kata kunci: *literasi kritis, keterampilan berpikir, guru sejarah, pendidikan sejarah*

Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series p-ISSN 2620-9284
<https://jurnal.uns.ac.id/shes> e-ISSN 2620-9292



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Guru merupakan salah satu elemen penting dalam praktik pendidikan formal. Peran guru dalam bidang pendidikan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang tersebut guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kata “profesional” dalam definisi tersebut makin menunjukkan bahwa pada abad 21 guru pada dasarnya merupakan profesi yang lahir melalui proses pendidikan dan pelatihan.

Para calon guru dididik dan dibina di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Melalui lembaga tersebut, diharapkan calon guru memiliki kompetensi sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai amanat undang-undang. Bahkan, proses pendidikan guru diperkuat melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia No. 87 Tahun 2013 penjelasan PPG yaitu sebagai berikut:

“Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan yang selanjutnya disebut program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/D IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidikan profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Meski demikian, bukan berarti setelah menimba ilmu di LPTK dan PPG upaya guru dalam mengasah kompetensinya berhenti. Justru setelah dinyatakan siap sebagai guru, para guru tersebut juga siap mengembangkan kompetensinya lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.

Pada abad 21 guru dituntut untuk mengubah paradigma pembelajaran lama dengan paradigma pendidikan abad 21. Paradigma pendidikan abad 21 merupakan suatu konsep yang mengintegrasikan kemampuan literasi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan terhadap penguasaan teknologi. Paradigma ini selaras dengan kondisi abad 21 dimana perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat. Hal ini saling berkaitan dengan era digital yang mendorong keterbukaan akses informasi. Akan tetapi, keterbukaan informasi juga menuai problematika. Pada satu sisi, ilmu pengetahuan dapat dengan mudah didapatkan sementara pada sisi yang lain muncul berbagai informasi yang perlu ditelaah lebih lanjut kebenarannya.

Munculnya berita hoax atau berita bohong merupakan salah satu dampak negatif dari derasnya arus informasi di abad 21. Berita hoax diciptakan untuk mereayasa suatu keadaan agar seolah berita hoax tersebut merupakan informasi yang benar (Septanto, 2018). Apabila berita hoax itu dipercaya oleh masyarakat maka akan terjadi kesalahpahaman antarindividu. Bahkan, dalam konteks kebangsaan dapat mengakibatkan perpecahan. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan, meski keterbukaan informasi dapat diakses dengan mudah bukan berarti guru melepaskan peserta didik dalam menerima informasi tanpa filterisasi. Peserta didik perlu menyaring informasi yang diterima dan skeptis terhadap suatu isu sehingga guru perlu membekali atau melatih peserta didik untuk berpikir kritis.

Paradigma di atas selaras dengan perspektif Wagner (2010) yang mengejawantahkan tujuh keterampilan yang harus dikuasai masyarakat pada abad 21, yaitu 1) pemikiran kritis dan pemecahan masalah, 2) kolaborasi dan kepemimpinan, 3) ketangkasan dan kemampuan beradaptasi, 4) inisiatif dan kewiraswastaan, 5) komunikasi lisan dan tulisan yang efektif, 6) mengakses dan menganalisis informasi, 7) keingintahuan dan imajinasi. Sementara itu, P21 (Partnership for 21st Century Learning) (Battelle for Kids, 2019) juga mengemukakan bahwa dalam praktik pendidikan, sekolah perlu mempromosikan materi pembelajaran yang memiliki level

tinggi yang memuat beberapa tema, yaitu 1) kesadaran global, 2) pengetahuan finansial, ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan, 3) pengetahuan bermasyarakat, 4) pengetahuan kesehatan, 5) pengetahuan mengenai lingkungan, dan 5) kemampuan berinovasi dalam pembelajaran.

Berbagai keterampilan yang dikemukakan di atas pada dasarnya dapat teraktualisasikan melalui berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah. Hal ini selaras dengan rekomendasi P21 atau *Partnership for 21st Century Learning* yang lebih lanjut mengemukakan bidang sejarah sebagai salah satu kunci dari sembilan aspek pengetahuan yang dianggap sangat berpengaruh dalam proses pendidikan abad 21. Pembelajaran sejarah merupakan proses pendidikan yang dilakukan manusia mengenai dinamika masa lampau untuk memahami realitas masa kini dan masa depan sehingga mendorong manusia untuk berpikir dan bertindak bijaksana.

Sebagai aktor lapangan yang berhadapan langsung dengan peserta didik, guru sejarah merupakan pengembang proses pembelajaran. Pengaruh guru dalam menerapkan metode maupun model pembelajaran sangat berperan terhadap keberhasilan transfer pengetahuan dan makna pembelajaran sejarah yang relevan dengan pendidikan abad 21. Salah satu upaya agar nilai dalam pembelajaran sejarah dapat ditransformasikan dengan baik kepada peserta didik adalah melalui pembiasaan literasi kritis.

Literasi kritis diidentifikasi sebagai kemampuan menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis (Wisudo, 2011). Melalui kemampuan literasi kritis, peserta didik diharapkan dapat memahami realita baik yang ditunjukkan secara tersurat maupun tersirat. Dalam pembelajaran sejarah, literasi kritis dapat ditunjukkan melalui materi narasi masa lampau yang bersifat politis dan kontroversial. Dalam hal ini dapat berupa materi sejarah politik ataupun perdebatan para sejarawan mengenai fakta lunak dalam peristiwa sejarah.

Berdasarkan cakupan konteks pembelajaran sejarah, guru sejarah pada dasarnya berpotensi mempromosikan literasi kritis. Hal tersebut ditandai dari proses pendidikan guru sejarah di LPTK dan PPG yang telah mengakomodasi berbagai pengetahuan yang mendorong guru sejarah memungkinkan untuk menerapkan metode literasi kritis dalam pembelajaran sejarah di tingkat sekolah menengah. Artikel ini mendiskusikan mengenai potensi guru sejarah dalam mempromosikan literasi kritis kepada peserta didik di jenjang SMA. Mengingat, dinamika zaman yang menuntut transformasi pola pikir dan signifikansi pembelajaran sejarah yang sangat relevan dalam era pendidikan abad 21.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bekal Literasi Kritis Calon Guru Sejarah

Pemahaman literasi kritis yang dimiliki calon guru sejarah tidak terlepas dari eksistensi program studi (prodi) sejarah di Indonesia. Eksistensi prodi sejarah pada dasarnya sudah muncul sebelum Indonesia merdeka. Hal ini ditandai oleh adanya jurusan sejarah di Universitas Indonesia (UI) pada 1940. Selanjutnya, pada 1950-an berdiri beberapa perguruan tinggi yang membuka program studi sejarah. Misalnya Universitas Gajah Mada (UGM) dan empat Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), yaitu PTPG Batusangkar (kini UNP), PTPG Bandung (kini UPI), PTPG Malang (kini UM), dan PTPG Tondano (kini UNIMA). Keempat PTPG tersebut dalam perkembangannya bertransformasi menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sehingga kajian keilmuannya tidak hanya memuat ilmu sejarah yang bersifat murni tetapi juga kependidikan.

Pada masa kini prodi pendidikan sejarah telah menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini ditandai oleh maraknya penyelenggaraan prodi pendidikan sejarah di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Dalam aspek

kurikulum, pembelajaran sejarah di PTN maupun PTS secara umum telah mendorong peserta didik memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai calon guru sejarah. Tentunya, kurikulum yang diterapkan pun harus menyesuaikan perkembangan zaman sehingga guru sejarah dapat mempromosikan literasi kritis kepada peserta didik.

Bekal literasi kritis guru sejarah saat menempuh jenjang S1 dapat digali melalui struktur mata kuliah. Perguruan tinggi penyelenggara prodi pendidikan sejarah pada umumnya memfasilitasi para mahasiswa pendidikan sejarah dalam mempelajari teori-teori pendidikan dan kesejarahan. Pada ilmu pendidikan, teori yang dipelajari sangat relevan ketika mengkaji permasalahan pendidikan pada ranah konseptual dan praksis. Selain itu, program magang kependidikan di sekolah yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi juga sangat membantu para mahasiswa dalam memahami realitas akademis maupun nonakademis di lingkungan sekolah. Adapun pada ranah ilmu kesejarahan, berbagai peristiwa masa lampau yang dipelajari menjadikan mahasiswa sejarah mampu berpikir kritis dan sistematis.

Beberapa tema sejarah yang dipelajari pada jenjang S1 misalnya sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah global, dan sejarah transnasional. Bahkan lebih khusus menekankan pada aspek kajian, misalnya sejarah politik, sejarah sosial dan ekonomi, sejarah maritim, sejarah pendidikan, sejarah kota, sejarah desa, sejarah lingkungan, sejarah transportasi dan lain sebagainya. Terlebih, konsep metodologi dan historiografi juga menjadi bahan kajian yang tidak pernah kering. Oleh karena itu, secara teori mahasiswa pendidikan sejarah telah berkenalan dengan literasi kritis melalui kajian-kajian keilmuan dalam prodi pendidikan sejarah.

Meski pengetahuan mengenai kependidikan dan keilmuan sejarah telah didapatkan pada jenjang S1, pemerintah seolah menegaskan bahwa kompetensi guru perlu diperkuat melalui pendidikan profesi. Oleh karena itu sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, para calon guru sejarah diarahkan untuk mengikuti Program Profesi Guru (PPG). Menurut Mulyasa (2007) guru maupun calon guru dianggap memiliki kompetensi profesional apabila memenuhi beberapa indikator yaitu, 1) kemampuan memahami dan menerapkan landasan kependidikan dan teori belajar peserta didik, 2) kemampuan mengembangkan proses pembelajaran, seperti menerapkan metode pembelajaran secara variatif, mengembangkan dan menggunakan media, alat dan sumber pembelajaran, 3) kemampuan mengorganisasikan program pembelajaran, evaluasi, dan menumbuhkan kepribadian peserta didik. Melalui aktivitas pembelajaran pada jenjang S1 dan PPG yang dicanangkan pemerintah, keterampilan literasi kritis seharusnya mampu dikuasai oleh calon guru sejarah dan guru sejarah. Modal inilah yang dapat ditularkan kepada peserta didik di sekolah ketika mahasiswa sejarah berprofesi sebagai guru sejarah.

Strategi guru Sejarah dalam Mempromosikan Literasi Kritis

Dalam proses kegiatan belajar dan mengajar, diperlukan strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini juga berlaku pada guru sejarah dalam mempromosikan literasi kritis. Upaya menginternalisasikan literasi kritis pada peserta didik dapat dilakukan terlebih dahulu melalui analisis kurikulum dan materi pembelajaran. Pada Kurikulum 2013 guru sejarah dapat melakukan analisis Kompetensi Dasar (KD) dan Kompetensi Inti (KI) yang terlampir pada dokumen Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Melalui analisis dokumen tersebut guru sejarah dapat memetakan KD dan materi yang memungkinkan literasi kritis tersebut diimplementasikan.

Salah satu materi yang mudah diidentifikasi untuk implementasi literasi kritis adalah wacana sejarah kontroversial. Sejarah kontroversial merupakan tema atau isu-

isu sejarah yang bersifat kontroversi. S.K Kochhar (2008) mengemukakan bahwa sejarah kontroversial terdapat dua jenis, yaitu kontroversi terkait fakta dan kontroversi mengenai signifikansi, relevansi, dan interpretasi kumpulan fakta. Berbeda dengan Kochhar, perspektif lebih khusus disampaikan Tsabit Azinar Ahmad (2016) yang mengejutkan bahwa sejarah kontroversial dapat ditinjau dari sifatnya, yaitu sejarah kontroversial akademik dan sejarah kontroversial sosial-politik.

Sejarah kontroversial akademik merupakan narasi sejarah yang menekankan pada perbedaan interpretasi sejarawan dalam melihat sumber sejarah sehingga berpengaruh terhadap historiografi. Biasanya pusran perdebatannya melingkupi temuan antara fakta lama dan fakta baru. Misalnya mitos penjajahan Belanda yang dilakukan selama 350 tahun dan perbedaan pendapat mengenai lokasi jejak suatu kerajaan. Sementara itu, sejarah kontroversial sosial-politik lebih menitikberatkan pada munculnya tendensi kepentingan personal/komunal, sosial, kultural, dan politik dalam historiografi. Dalam hal ini negara atau pemerintah memiliki keterlibatan yang relatif besar terhadap historiografi resmi yang diproduksi (Ahmad, 2016). Beberapa peristiwa sejarah yang termasuk dalam kategori ini misalnya, peristiwa G30S, penerbitan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), lahirnya Pancasila dan lahirnya Orde Baru. Hingga saat ini, meski kekuasaan Orde Baru telah tumbang, narasi kontroversial dari peristiwa-peristiwa tersebut masih diperdebatkan oleh berbagai pihak, khususnya para akademisi.

Selain melalui wacana sejarah kontroversial, literasi kritis pada dasarnya juga dapat dilakukan secara umum terhadap berbagai materi. Akan tetapi perlu menggunakan konsep keterampilan *historical thinking* atau berpikir historis. Dengan menggunakan konsep berpikir historis substansi literasi kritis dapat tersampaikan dengan baik. Hal ini karena konsep berpikir historis dapat mengonstruksi pemikiran kritis peserta didik (Zed, 2018).

Konsep berpikir historis pada dasarnya mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut ditandai oleh proyek pengempangan berpikir historis yang dilakukan oleh *National Center For History in the School* (NCHS) di University of California Los Angeles, Amerika Serikat pada 1996. Menurut NCHS berpikir historis harus memiliki beberapa kemampuan, yaitu 1) *chronological thinking* (berpikir kronologis), 2) *historical comprehension* (pemahaman historis), 3) *historical analysis and interpretation* (analisis dan interpretasi historis), 4) *historical research capabilities* (kemampuan penelitian historis), 5) *historical issues–analysis and decision making* (analisis isu historis dan pengambilan keputusan) (Symcox, 2002).

Selain NCHS, sebuah proyek pengembangan berpikir historis juga dilakukan melalui *The Historical Thinking Project* (HTP) yang berpusat di University of Columbia, Kanada. Dalam proyek tersebut konsep berpikir historis memuat enam indikator, yaitu 1) *historical significance* (menemukan signifikansi historis), 2) *primary source evidence* (menggunakan sumber primer sebagai bukti), 3) *Continuity and change* (mengidentifikasi kontinuitas dan perubahan), 4) *cause and consequence* (menganalisis sebab dan akibat), 5) *Historical perspective-taking* (mengambil perspektif historis), 6) *the ethical dimension* (memahami dimensi etis interpretasi historis) (Seixas, 2015).

Pengembangan konsep berpikir historis menunjukkan adanya upaya untuk mengarahkan kemampuan berpikir peserta didik menjadi seperti sejarawan. Sebagai contoh, penggunaan sumber primer dalam konsep berpikir historis akan mendorong peserta didik tidak teraliansi dengan peristiwa masa lampau yang sangat berbeda dengan kehidupan peserta didik pada masa kini. Dengan demikian secara tidak langsung peserta didik akan menemukan *sense of history* yang kemudian dapat direfleksikan.

SIMPULAN

Implementasi pendidikan guru sejarah di LPTK pada dasarnya telah mengakomodasi calon guru sejarah memiliki pengetahuan literasi kritis. Hal ini ditandai dari konsep keilmuan dari pendidikan sejarah dan struktur kurikulum yang diterapkan oleh LPTK. Bahkan penguatan kompetensi calon guru sejarah juga melalui PPG. Berbekal hal tersebut seharusnya guru sejarah dapat dengan mudah mempromosikan literasi kritis dalam pembelajaran sejarah di ruang-ruang kelas. Terlebih, konsep keilmuan pendidikan sejarah pada dasarnya juga mendorong pemikiran kritis peserta didik melalui berbagai kajian kesejarahan. Meski secara teoretis berdasarkan kajian ini guru sejarah dianggap mampu mempromosikan literasi kritis, namun tetap diperlukan penelitian lanjutan untuk menggambarkan dan menguji secara konkret implementasi pendekatan literasi kritis yang dilakukan guru sejarah. Dengan demikian dapat ditunjukkan hasil konkret dari pendekatan literasi kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T.A. 2016. *Sejarah Kontroversial di Indonesia: Persoektif Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- E. Mulyasa. 2007. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Kochhar, S.K. 2008. *Pembelajaran Sejarah*. Penerjemah H. Purwanta dan Yofita Hardiwati. Jakarta: Grasindo
- P21 (*Partnership for 21st Century Learning*)
<http://www.battelleforkids.org/networks/p21> diakses 14 Desember 2021
- Permendikbud Republik Indonesia No. 87 Tahun 2013
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permendikbud87-2013PendidikanProfesiGuru.pdf> diakses 16 Desember 2021
- Seixas, P. 2015. A Model of Historical Thinking. *Educational Philosophy and Theory*, 49 (6) 593-606
- Septanto, H. 2018. Pengaruh HOAX dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat. *Kalbiscentia: Jurnal Sains dan Teknologi*, 5 (2) 157-162
- Symcox, L. 2002. *Whose History?: The struggle for national Standard in American Classrooms*. New York & London: Teachers Colege Columbia University
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
<https://ppg.kemdikbud.go.id/download/undang-undang-republik-indonesia-nomor-14-tahun-2005-tentang-guru-dan-dosen/> diakses 14 Desember 2021
- Wagner, T. 2010. *The Global Avheivement Gap: Why Even Our Best Schools Don't Teach the New Survival Skills Our Children Need and What We Can Do About It*. New York: Basic Books.
- Wisudo, B. 2011. Literasi Kritis, Alternatif Melawan Pendangkalan Pembelajaran Di Sekolah. H.A.R Tilaar, Jimmy Ph. Paat, Lody Paat. *Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, Dan Perkembangannya di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta
- Zed, M. 2018. Tentang Konsep Berpikir Sejarah. *Lensa Budaya*, 13 (1) 54-60